



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BIMA KARTIKA**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **224408**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.510.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/150 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 261 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **251.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1991, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ETIOS VALCO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. MOBIL, TOYOTA SEDAN VIOS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **25.750.000**

D. SURAT BERTHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **20.077.932**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.807.327.932**



III. HUTANG

Rp. 300.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.507.327.932

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.